



Kemenangan dan Kejatuhan Khmer Merah: Studi Historis atas Strategi Militer Pol Pot (1970–1979)

*(The Rise and Fall of the Khmer Rouge: A Historical Study of
Pol Pot's Military Strategy (1970–1979))*

Vun Sithath*, Mhd Halkis

Fakultas Strategi Pertahanan, Unhan RI

*) Perwira Menengah Angkatan Darat Kamboja,

email: sithatvun@gmail.com

Abstract

The Cambodian Civil War (1970–1979) stands as one of the bloodiest conflicts in Southeast Asia, with Pol Pot and the Khmer Rouge playing a central role in its military and political dynamics. This article seeks to analyze Pol Pot's military strategies that enabled the Khmer Rouge to defeat Lon Nol's regime in 1975, while also examining the factors underlying their subsequent failure against Hun Sen and Vietnamese forces in the late 1970s. Employing a qualitative-descriptive approach rooted in historical analysis, this study integrates theories of asymmetric warfare, guerrilla warfare, and regime change to explain both the successes and limitations of the Khmer Rouge's strategies. Findings reveal that the Khmer Rouge's victory was largely driven by the application of guerrilla tactics, ideological propaganda, the mobilization of rural peasants through agrarian policies, and external support from North Vietnam and China. However, repressive policies, forced relocations, mass famine, and the erosion of social legitimacy emerged as decisive factors behind their downfall when confronted with the coordinated offensive of Vietnamese forces supporting Hun Sen. This analysis underscores that asymmetric strategies can be effective in the short term for seizing power, but ultimately fail to ensure long-term political stability without sustained domestic legitimacy and international support. The study's implications are relevant to the broader fields of military history and contemporary strategy, particularly in understanding the inherent limitations of insurgencies in sustaining control over modern states.

Keywords: Khmer Rouge; Pol Pot; Cambodian Civil War; Asymmetric Warfare; Military History

Abstrak

Perang Saudara Kamboja (1970–1979) merupakan salah satu konflik paling berdarah di Asia Tenggara, dengan Pol Pot dan Khmer Merah memainkan peran sentral dalam

dinamika militer dan politik. Artikel ini bertujuan menganalisis strategi militer Pol Pot yang membawa Khmer Merah pada kemenangan melawan pemerintahan Lon Nol pada 1975, sekaligus menguraikan faktor-faktor kegagalannya ketika menghadapi Hun Sen dan pasukan Vietnam pada akhir dekade 1970-an. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi sejarah, penelitian ini mengintegrasikan teori peperangan asimetris, perang gerilya, serta teori perubahan rezim untuk menjelaskan keberhasilan dan keterbatasan strategi Khmer Merah. Temuan menunjukkan bahwa kemenangan Khmer Merah sangat ditopang oleh penerapan taktik gerilya, propaganda ideologis, mobilisasi massa pedesaan melalui kebijakan agraria, serta dukungan eksternal dari Vietnam Utara dan Tiongkok. Namun, kebijakan represif, pemindahan paksa, kelaparan massal, serta hilangnya legitimasi sosial menjadi faktor utama keruntuhan Khmer Merah ketika menghadapi serangan terkoordinasi pasukan Vietnam yang mendukung Hun Sen. Analisis ini menegaskan bahwa strategi asimetris efektif dalam jangka pendek untuk merebut kekuasaan, tetapi gagal memberikan stabilitas politik jangka panjang tanpa legitimasi domestik dan dukungan internasional yang berkelanjutan. Implikasi penelitian ini relevan bagi kajian sejarah militer dan strategi kontemporer, khususnya dalam memahami keterbatasan insurgensi dalam mempertahankan kekuasaan negara modern.

Kata Kunci

Khmer Merah; Pol Pot; Perang Saudara Kamboja; Peperangan Asimetris; Sejarah Militer

Pendahuluan

Perang Saudara Kamboja pada periode 1970 hingga 1979 merupakan salah satu babak paling tragis sekaligus kompleks dalam sejarah politik dan militer Asia Tenggara modern. Konflik ini tidak hanya menandai pertarungan ideologi antara komunisme dan nasionalisme, tetapi juga memperlihatkan bagaimana strategi militer non-konvensional mampu mengubah arah kekuasaan suatu negara. Pol Pot, sebagai pemimpin Khmer Merah, memainkan peran utama dalam mengarahkan strategi militer yang bertujuan menggulingkan pemerintahan Lon Nol, sekaligus mempertahankan kendali setelah berhasil merebut Phnom Penh pada tahun 1975. Namun, kekuasaan tersebut runtuh hanya dalam kurun waktu empat tahun, ketika Khmer Merah menghadapi intervensi militer Vietnam yang mendukung Hun Sen, sehingga menandai berakhirnya fase penting dalam sejarah Kamboja.

Kajian tentang strategi militer Pol Pot menjadi penting bukan hanya karena keberhasilan awal Khmer Merah dalam menggulingkan rezim Lon Nol, tetapi juga karena kegagalannya mempertahankan kekuasaan ketika berhadapan dengan aktor regional yang lebih kuat. Fenomena ini menyoroti paradoks dari strategi asimetris: mampu menghasilkan kemenangan spektakuler dalam jangka pendek, namun rapuh dalam mempertahankan kekuasaan negara jangka panjang (Metz & Johnson, 2001). Perspektif sejarah militer memungkinkan kita memahami bagaimana kombinasi antara taktik gerilya, propaganda ideologis, mobilisasi massa, serta aliansi internasional dapat membawa dampak yang signifikan terhadap jalannya perang dan dinamika kekuasaan.

Dari perspektif akademis, penelitian sebelumnya telah banyak menyoroti kekejaman rezim Khmer Merah, khususnya dalam konteks genosida, pemindahan paksa, dan pelanggaran hak asasi manusia (Chandler, 1999; Kiernan, 2002). Namun, studi yang secara khusus menganalisis strategi militer Pol Pot dalam kerangka teori peperangan asimetris masih relatif terbatas. Nguyen (2023), misalnya, menekankan dimensi transformasi sosial yang dipaksakan, sementara Chan dan Rith (2022) lebih fokus pada kebijakan agraria revolusioner. Analisis Davies dan Rees (2023) mengenai mobilisasi ideologis Khmer Merah juga memberikan kontribusi penting, tetapi belum secara utuh menghubungkan antara faktor militer dan kegagalan rezim. Oleh karena itu, studi ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menempatkan strategi militer Pol Pot sebagai pusat analisis, sekaligus mengaitkannya dengan keberhasilan dan kegagalan Khmer Merah dalam konteks sejarah militer.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan kerangka kerja yang menggabungkan teori perang gerilya Mao Zedong (1961), teori strategi asimetris (Metz & Johnson, 2001), serta teori perubahan rezim (Scott, 1998). Ketiga teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana Khmer Merah, sebagai kekuatan kecil dengan sumber daya terbatas, mampu menantang dan mengalahkan pemerintahan Lon Nol yang didukung oleh Amerika Serikat. Namun, teori yang sama juga membantu

menjelaskan mengapa strategi tersebut tidak cukup efektif menghadapi kekuatan konvensional Vietnam yang terorganisir dan didukung oleh legitimasi politik yang lebih kuat.

Artikel ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian utama: (1) bagaimana strategi militer Pol Pot membawa Khmer Merah pada kemenangan melawan Lon Nol; (2) mengapa strategi tersebut gagal mempertahankan kekuasaan menghadapi Hun Sen; dan (3) apa implikasi akademis dan praktis dari kemenangan sekaligus kejatuhan Khmer Merah terhadap studi sejarah militer. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi ganda: pertama, memperkaya literatur sejarah militer Asia Tenggara; dan kedua, memberikan pelajaran strategis bagi studi peperangan kontemporer yang melibatkan insurgensi dan konflik asimetris.

Lebih jauh, penelitian ini memiliki relevansi praktis bagi dunia militer dan strategi pertahanan. Keberhasilan Khmer Merah dalam mengeksploitasi kelemahan lawan melalui taktik gerilya dan propaganda menegaskan pentingnya fleksibilitas dan adaptasi dalam menghadapi konflik non-konvensional. Namun, kegagalan mereka dalam mempertahankan kekuasaan juga menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya legitimasi politik, dukungan sosial, dan keberlanjutan aliansi internasional. Dalam konteks yang lebih luas, pengalaman Khmer Merah menunjukkan bahwa strategi militer semata tidak cukup untuk membangun stabilitas jangka panjang tanpa basis legitimasi yang kuat dan tata kelola pemerintahan yang efektif (Collier, 2009).

Dengan menyoroti kemenangan dan kejatuhan Khmer Merah, artikel ini tidak hanya merekonstruksi dinamika militer di Kamboja, tetapi juga menawarkan refleksi kritis mengenai hubungan antara strategi militer, kekuasaan politik, dan keberlanjutan negara. Studi historis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori peperangan asimetris, sekaligus memperkaya khazanah kajian sejarah militer global.

2. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

2.1 Teori Perang Gerilya (Guerrilla Warfare Theory)

Konsep perang gerilya merupakan fondasi penting dalam memahami strategi Khmer Merah di bawah Pol Pot. Mao Zedong (1961) dalam *On Guerrilla Warfare* menekankan bahwa kekuatan kecil dapat mengalahkan kekuatan besar dengan memanfaatkan mobilitas, kejutan, serta dukungan rakyat. Pol Pot mengadopsi prinsip ini dengan menekankan taktik “hit and run,” penguasaan medan pedesaan, serta kemampuan berbaur dengan masyarakat desa. Dukungan rakyat pedesaan yang terpinggirkan oleh pemerintahan Lon Nol menjadi sumber daya utama bagi keberhasilan Khmer Merah.

Dalam konteks Kamboja, perang gerilya juga dipadukan dengan strategi psikologis dan ideologis. Khmer Merah tidak hanya mengandalkan serangan militer, tetapi juga membangun narasi anti-imperialis untuk memperkuat identitas kolektif dan menumbuhkan rasa kebencian terhadap rezim Lon Nol yang didukung Amerika Serikat (Davies & Rees, 2023). Hal ini memperlihatkan bahwa teori perang gerilya tidak hanya bersifat teknis-militer, melainkan juga ideologis.

2.2 Teori Strategi Asimetris (Asymmetric Warfare Theory)

Metz dan Johnson (2001) mendefinisikan perang asimetris sebagai upaya kelompok lemah untuk mengimbangi kekuatan yang lebih besar dengan cara-cara non-konvensional. Pol Pot memanfaatkan kelemahan struktural pemerintahan Lon Nol, terutama keterbatasan kontrol di wilayah pedesaan, sebagai arena untuk memperluas pengaruh Khmer Merah.

Dalam kerangka ini, keberhasilan Khmer Merah dapat dijelaskan melalui kemampuan mengeksploitasi keterbatasan lawan. Lon Nol bergantung pada pasokan logistik dan bantuan militer dari Amerika Serikat, namun tidak mampu membangun legitimasi politik di dalam negeri (Chandler, 1999). Sebaliknya, Khmer Merah memanfaatkan struktur sosial pedesaan yang resisten terhadap urbanisasi dan modernisasi paksa untuk membangun basis kekuatan. Namun, teori ini juga menjelaskan kegagalan Khmer Merah ketika menghadapi Vietnam: strategi asimetris menjadi tidak efektif ketika berhadapan dengan pasukan reguler yang lebih terlatih dan memiliki dukungan logistik jangka panjang (Smith, 2023).

2.3 Teori Revolusi dan Pergantian Kekuasaan (Revolution and Regime Change Theory)

Scott (1998) dalam *Seeing Like a State* menekankan bahwa kebijakan revolusioner sering gagal ketika mengabaikan realitas sosial dan struktur lokal. Pol Pot mencoba membangun masyarakat agraris utopis dengan menghapus kepemilikan pribadi, membubarkan keluarga, dan memindahkan penduduk kota ke desa. Kebijakan ini pada awalnya menjadi instrumen konsolidasi kekuasaan, tetapi dalam jangka panjang justru memicu resistensi sosial dan krisis kemanusiaan (Chan & Rith, 2022).

Dari perspektif teori perubahan rezim, kemenangan Khmer Merah melawan Lon Nol merupakan bukti keberhasilan revolusi bersenjata, tetapi kegagalan mempertahankan kekuasaan menunjukkan keterbatasan kebijakan yang bersifat utopis dan represif.

2.4 Teori Keamanan Internal dan Pengelolaan Konflik (Internal Security and Conflict Management Theory)

Collier (2009) menegaskan bahwa keberlangsungan suatu rezim sangat ditentukan oleh legitimasi politik dan kemampuan mengelola konflik internal. Khmer Merah gagal dalam aspek ini, karena strategi represi justru mengikis dukungan rakyat. Sebaliknya, Hun Sen berhasil memanfaatkan dukungan Vietnam untuk membangun kembali struktur pemerintahan yang relatif stabil, meskipun dengan karakteristik otoriter.

Dalam perspektif ini, legitimasi menjadi variabel kunci. Dukungan awal masyarakat pedesaan terhadap Pol Pot bersifat instrumental, tetapi hilang setelah kebijakan agraria ekstrem menciptakan kelaparan dan kematian massal. Teori ini menjelaskan bahwa kemenangan militer tidak otomatis menghasilkan stabilitas politik tanpa basis legitimasi yang kuat.

2.5 Teori Sistem dan Interaksi Internasional (System and International Interaction Theory)

Waltz (1979) dalam *Theory of International Politics* menjelaskan bahwa perilaku negara dipengaruhi oleh struktur sistem internasional. Dalam kasus Kamboja, kemenangan awal Khmer Merah tidak terlepas dari dukungan Vietnam Utara dan Tiongkok. Namun, dinamika geopolitik kawasan berubah ketika Vietnam meningkatkan intervensinya dan membangun aliansi dengan Hun Sen.

Dengan demikian, kejatuhan Pol Pot tidak hanya dipicu oleh kegagalan internal, tetapi juga oleh pergeseran dalam sistem internasional. Dukungan internasional yang semula menopang Khmer Merah akhirnya berbalik menjadi isolasi diplomatik karena pelanggaran HAM yang meluas (Johnson, 2024).

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis-deskriptif karena tujuan utamanya adalah menganalisis strategi militer Pol Pot dalam kerangka sejarah militer, bukan menguji hipotesis kuantitatif. Metode historis-deskriptif memungkinkan penelusuran yang sistematis terhadap dinamika politik, sosial, dan militer Kamboja pada periode 1970–1979, sekaligus menelaah hubungan antara strategi militer Khmer Merah, keberhasilan mereka menggulingkan Lon Nol, serta kegagalannya menghadapi Hun Sen dan militer Vietnam.

Data penelitian berasal dari kombinasi sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi wawancara langsung (in-depth, semi-terstruktur) dengan pejabat serta akademisi di Kamboja yang relevan dengan topik penelitian. Di antaranya adalah H.E. Lt. Gen. Hun Manith (Kementerian Pertahanan/Kepala Intelijen; Wakil Komandan RCAF), H.E. Gen. Nem Sovath (Kementerian Pertahanan), Dr. Vong Sotheara (Direktur Departemen Sejarah, Royal University of Phnom Penh), dan H.E. Director Chhay Sophal (Kementerian Informasi). Selain itu, digunakan pula dokumen arsip terkait Perang Saudara Kamboja, pernyataan politik Khmer Merah, pidato Pol Pot, laporan resmi dari pemerintah Vietnam dan Amerika Serikat, serta laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai situasi politik dan kemanusiaan Kamboja pada dekade 1970-an. Sumber sekunder mencakup monograf klasik mengenai rezim Khmer Merah (misalnya Chandler, 1999; Kiernan, 2002; Short, 2005), artikel jurnal mutakhir yang membahas strategi militer, propaganda, dan transformasi sosial (misalnya Chan & Rith, 2022; Davies & Rees, 2023; Nguyen, 2023; Smith, 2023; Johnson, 2024), dan literatur teoretis yang menjadi kerangka analitik (Mao, 1961—perang gerilya; Metz & Johnson, 2001—strategi asimetris; Scott, 1998—perubahan rezim; Collier, 2009—keamanan internal; Waltz, 1979—sistem internasional).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (perpustakaan, arsip digital, dan basis data jurnal internasional) serta pelaksanaan wawancara semi-terstruktur. Panduan wawancara dirancang untuk menggali tiga klaster tematik: (1)

strategi dan operasi militer Khmer Merah, termasuk taktik gerilya, logistik, dan penguasaan wilayah; (2) mobilisasi sosial, propaganda ideologis, dan kebijakan agraria yang menopang dukungan pedesaan; (3) interaksi eksternal dan faktor yang berkontribusi pada kejatuhan rezim (1978–1979). Wawancara dicatat dalam bentuk rekaman dan/atau catatan lapangan, kemudian ditranskripsi. Bila narasumber menggunakan bahasa Khmer atau Inggris, transkrip diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan prosedur *back-translation* terbatas untuk menjaga akurasi makna.

Analisis data menggabungkan **analisis naratif** dan **analisis komparatif**. Analisis naratif digunakan untuk merekonstruksi kronologi peristiwa kunci—termasuk pengepungan dan jatuhnya Phnom Penh (April 1975), kebijakan “Year Zero”, serta eskalasi konflik perbatasan dengan Vietnam—dengan menjadikan titik-titik peristiwa penting sebagai *anchor points*. Analisis komparatif digunakan untuk menilai perbedaan strategi Pol Pot ketika berhadapan dengan dua lawan yang berbeda: angkatan bersenjata Republik Khmer (FANK) di bawah Lon Nol dan militer reguler Vietnam yang mendukung Hun Sen. Seluruh data (wawancara, arsip, dan literatur) dikodekan secara tematik—misalnya operasi/medan, logistik, propaganda, legitimasi domestik, dan dukungan eksternal—kemudian ditriangulasikan antar-sumber guna meminimalkan bias interpretatif.

Validitas penelitian dijaga melalui (a) pemilihan sumber akademik bereputasi, (b) *source triangulation* antara wawancara, arsip, dan publikasi ilmiah, serta (c) *audit trail* prosedural yang mendokumentasikan tahapan penelusuran, seleksi, pengodean, dan interpretasi data. Aspek etika penelitian mencakup pemberian informasi kepada narasumber mengenai tujuan penelitian, penggunaan data untuk kepentingan ilmiah, dan perlindungan identitas apabila diminta (misalnya anonimisasi sebagian data sensitif).

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Akses terhadap arsip resmi Khmer Merah masih terbatas karena sifat rezim yang tertutup; sebagian sumber berperspektif eksternal (Amerika Serikat, Vietnam, atau pengamat internasional)

sehingga berpotensi mengandung bias politik; dan keterbatasan waktu/lokasi membatasi jangkauan terhadap seluruh saksi sejarah. Meskipun demikian, konsistensi temuan dari wawancara, dokumen arsip, dan literatur ilmiah menyediakan basis yang memadai untuk merekonstruksi dinamika strategi militer Khmer Merah serta menilai batas-batas efektivitas strategi asimetris dalam konteks negara modern.

6. Hasil dan Analisis

Hasil penelitian ini merekonstruksi secara kronologis dan tematik dinamika strategi militer Khmer Merah di bawah Pol Pot sepanjang 1970–1979, dengan mengintegrasikan data arsip, literatur akademik, dan kesaksian narasumber kunci. Temuan memperlihatkan dua fase utama yang saling bertolak belakang: (1) fase kemenangan melawan pemerintahan Lon Nol (1970–1975) yang ditopang oleh strategi asimetris berbasis gerilya, propaganda, dan dukungan eksternal; serta (2) fase kejatuhan menghadapi Hun Sen yang didukung Vietnam (1978–1979) sebagai konsekuensi dari kebijakan represif, erosi legitimasi sosial, dan keunggulan militer konvensional pihak lawan.

Fase kemenangan 1970–1975. Sejak 1970, Khmer Merah membangun jaringan gerilya berlapis di wilayah pedesaan. Unit-unit kecil menerapkan mobilitas tinggi, penyamaran, dan serangan kilat (*hit-and-run*) sambil memanfaatkan medan hutan, sungai, dan jaringan desa sebagai “ruang hidup” gerilyawan (Smith, 2023). Strategi ini konsisten dengan doktrin perang rakyat ala Mao — gerilyawan sebagai “ikan” yang hidup di “air” dukungan rakyat — yang diterjemahkan Khmer Merah ke dalam praktik perekrutan berbasis komunitas dan pembentukan komite desa untuk logistik, sandi, dan pengintaian (Mao, 1961). Narasumber militer Kamboja menegaskan bahwa keberhasilan awal operasi Khmer Merah tidak terpaut pada keunggulan senjata, melainkan pada disiplin pergerakan, ketekunan intelijen lapangan, dan penggunaan medan pedalaman yang menyulitkan operasi konvensional FANK (H. Manith, komunikasi personal, 12 Agustus 2024).

Dalam waktu bersamaan, propaganda ideologis berperan sebagai pengungkit sosial. Narasi anti-imperialis dan janji egalitarian agraris menciptakan resonansi di desa-desa yang merasa terdesak oleh sentralisasi urban. Literatur menunjukkan bahwa Khmer Merah menggabungkan pesan politik dengan kebijakan nyata—redistribusi lahan di area yang dikuasai—sehingga dukungan pedesaan beralih dari pasif ke aktif (Davies & Rees, 2023). Hal ini memperkuat kapasitas rekrutmen, mempercepat penyebaran logistik, dan menutup celah intelijen bagi FANK.

Kelemahan struktural Lon Nol berkontribusi signifikan. Pemerintahan pascarezim Sihanouk ini menghadapi krisis legitimasi domestik, korupsi, dan ketergantungan pada bantuan militer-ekonomi Amerika Serikat (Clymer, 2004; Shawcross, 1987). Daya tahan FANK merosot bukan hanya karena adaptasi yang lambat terhadap perang tak-konvensional, tetapi juga rendahnya moral tempur akibat ketidakpastian politik dan logistik yang rapuh (Chandler, 2008). Di titik ini, strategi asimetris Khmer Merah menumpangi “biaya friksi” lawan: sedikit kekuatan gerilya menghasilkan dampak yang melampaui ukuran karena mencolokkan kelemahan lawan yang tidak elastis (Metz & Johnson, 2001).

Dukungan eksternal memperbesar daya gempur. Pada fase kritis, Khmer Merah memperoleh suplai senjata, pelatihan, dan dukungan politik dari Vietnam Utara dan Tiongkok (Haas, 1991). Dukungan ini memungkinkan peningkatan frekuensi dan skala operasi, termasuk pelemahan bertahap garis suplai FANK dan penekanan psikologis terhadap kota. Menjelang 1975, pengepungan Phnom Penh dilakukan melalui pemutusan akses darat serta tekanan artileri pada simpul-simpul logistik. Laporan arsip dan kesaksian menyebutkan bahwa operasi final dikelola dalam pola konsentris yang mempersempit ruang manuver FANK hingga ibu kota jatuh pada 17 April 1975 (Becker, 1986; Deac, 2000; H. Manith, komunikasi personal, 12 Agustus 2024). Secara empiris, fase kemenangan meneguhkan proposisi bahwa strategi gerilya efektif ketika bertumpu pada dukungan sosial pedesaan, kelemahan struktural rezim lawan, dan suplai eksternal yang memadai (Johnson, 2024; Smith, 2023).

Fase pascakemenangan dan awal kejatuhan 1975–1979. Setelah berkuasa, Pol Pot mendeklarasikan “Year Zero”, mengejar proyek rekayasa sosial radikal: evakuasi kota, kolektivisasi agraria, pembubaran institusi modern, dan pemaksaan kerja massal. Dokumentasi sejarah menunjukkan bahwa kebijakan tersebut menciptakan krisis kemanusiaan dalam bentuk kelaparan, penyakit, dan kematian massal, disertai represi kejam melalui struktur keamanan internal dan penjara politik seperti S-21 (Chandler, 1999; Etcheson, 2005; Hinton, 2005; Kiernan, 2002). Hasil penelitian ini menemukan bahwa kebijakan ekstrem yang tidak kompatibel dengan realitas sosial pedesaan justru membalikkan modal sosial Khmer Merah: dukungan rakyat menyusut dari aktif ke enggan, lalu menjadi resistif. Dalam kerangka Mao, “air” yang menopang “ikan” mengering akibat eksese kekuasaan negara sendiri.

Erosi legitimasi domestik menimbulkan konsekuensi operasional. Jaringan suplai pedesaan yang sebelumnya menopang gerilya menjadi tidak andal; laporan lapangan menunjukkan meningkatnya pelaporan posisi gerilyawan oleh warga yang terdampak kebijakan paksa (N. Sovath, komunikasi personal, 15 Agustus 2024). Dalam konteks ini, temuan mengonfirmasi tesis Collier (2009) bahwa ketahanan rezim sangat bergantung pada legitimasi; represi yang menggerus legitimasi membuat kapasitas koersif negara menjadi rapuh, terlebih ketika menghadapi ancaman eksternal.

Konfrontasi dengan Vietnam mempercepat titik balik. Sengketa perbatasan, operasi penyerbuan lintas batas oleh Khmer Merah, dan pilihan aliansi luar negeri memicu respons Vietnam yang terukur dan bereskalasi. Pada akhir 1978, Vietnam melancarkan invasi besar dengan dukungan logistik dan keunggulan operasi reguler; Phnom Penh direbut pada Januari 1979, dan pemerintahan pro-Hanoi dibentuk dengan figur Hun Sen sebagai poros politik (Haas, 1991; Vickery, 1999). Dari sudut pandang sistem internasional, temuan ini menegaskan bahwa kalkulus kekuasaan di lingkungan regional—termasuk perubahan aliansi dan legitimasi internasional—ikut menentukan kelangsungan rezim kecil (Waltz, 1979). Secara empiris, strategi asimetris

yang sangat efektif melawan FANK terbukti tidak memadai melawan militer reguler Vietnam yang memiliki kedalaman logistik, interoperabilitas unit, dan *tempo* operasi yang lebih tinggi (Smith, 2023).

Sintesis temuan kunci. Pertama, keberhasilan 1970–1975 ditopang sinergi antara taktik gerilya, mobilisasi ideologis, dan dukungan eksternal, sembari mengeksploitasi defisit legitimasi dan performa institusional rezim Lon Nol (Clymer, 2004; Chandler, 2008; Davies & Rees, 2023). Kedua, pascakemenangan 1975–1979, strategi pengelolaan kekuasaan Khmer Merah gagal mengonversi kemenangan militer menjadi stabilitas politik: kebijakan yang memutus mata pencaharian, kohesi keluarga, dan jaringan komunitas memicu delegitimasi (Kiernan, 2002; Hinton, 2005; Etcheson, 2005). Ketiga, dimensi eksternal berperan ganda: awalnya sebagai *enabler* kemenangan (dukungan Vietnam Utara/Tiongkok), kemudian sebagai determinan kejatuhan ketika Vietnam — dengan kemampuan militer reguler — melikuidasi kapasitas tempur Khmer Merah (Haas, 1991; Vickery, 1999). Keempat, transisi strategi dari gerilya ke pemerintahan tidak disertai adaptasi kebijakan publik yang memelihara basis sosial; keunggulan *coercive capacity* tanpa legitimasi domestik tidak berkelanjutan (Collier, 2009). Kelima, hasil membuktikan kontekstualitas strategi asimetris: efektif terhadap rezim lemah dan tidak adaptif, tetapi runtuh saat menghadapi lawan reguler dengan dukungan logistik superior dan *coalition support*.

Bukti triangulatif dari wawancara. Narasumber militer menekankan bahwa inti operasi kemenangan bukan serangan besar tunggal, melainkan akumulasi serangan kecil yang mengikis logistik dan moral FANK—serta keberhasilan menutup kebocoran intelijen melalui dukungan desa (H. Manith, komunikasi personal, 12 Agustus 2024). Akademisi sejarah Kamboja menambahkan bahwa transformasi pascakemenangan yang sangat cepat—evakuasi kota dan kolektivisasi—menciptakan dislokasi sosial yang menggerus dukungan akar rumput, sehingga kemampuan rezim menjaga jaringan logistik pedalaman merosot drastis (V. Sotheara, komunikasi personal, 10 Agustus 2024). Pejabat sektor informasi menegaskan adanya pergeseran

fungsi propaganda: dari alat mobilisasi menuju instrumen kontrol yang tidak efektif karena realitas keseharian rakyat membantah klaim keberhasilan (C. Sophal, komunikasi personal, 18 Agustus 2024). Triangulasi dengan arsip dan literatur memperlihatkan konsistensi pola sebab-akibat ini.

Implikasi empiris untuk teori. Meskipun bagian teori dibahas tersendiri, hasil ini mengandung signifikansi konseptual: (a) doktrin Mao tentang sentralitas rakyat dalam perang gerilya terbukti perluasan maknanya pada fase pemerintahan—bukan hanya perebutan kekuasaan—sebab *social contract* yang putus mematikan suplai dukungan; (b) kerangka asimetris ala Metz dan Johnson (2001) valid untuk fase perebutan, namun perlu memasukkan variabel legitimasi dan manajemen pemerintahan sebagai kondisi pemeliharaan hasil; (c) perspektif Waltz (1979) membantu menjelaskan mengapa rezim kecil yang mengabaikan perubahan struktur aliansi regional menjadi sangat rentan terhadap intervensi eksternal.

Secara keseluruhan, rekonstruksi hasil ini menunjukkan bahwa kemenangan militer Khmer Merah tidak bertransformasi menjadi stabilitas politik karena konfigurasi tiga faktor: (1) kebijakan domestik yang meniadakan basis legitimasi; (2) ketidakmampuan beradaptasi dari strategi gerilya ke tata kelola negara; dan (3) realitas sistem internasional yang menempatkan Vietnam sebagai aktor dengan *conventional overmatch*. Ketiga faktor ini—ditopang bukti arsip, literatur, dan komunikasi personal—membentuk gambaran utuh tentang naik-turun strategi Pol Pot: dari efektif sebagai insurgensi hingga kolaps sebagai rezim yang berkuasa. Temuan ini, pada akhirnya, mempertegas batas-batas strategi asimetris di negara modern: efektif untuk perebutan, rapuh untuk keberlanjutan tanpa legitimasi domestik dan dukungan eksternal yang terkelola.

7. Diskusi

7.1 Paradoks Strategi Asimetris

Hasil penelitian ini memperlihatkan paradoks yang sering muncul dalam peperangan asimetris. Pol Pot berhasil mengalahkan Lon Nol dengan strategi gerilya, propaganda, dan dukungan eksternal, tetapi strategi yang sama gagal ketika menghadapi Hun Sen yang didukung penuh oleh Vietnam. Hal ini sejalan dengan pandangan Metz dan Johnson (2001), bahwa keberhasilan strategi asimetris sangat bergantung pada ketidakmampuan lawan beradaptasi. Lon Nol, dengan militer yang korup dan bergantung pada Amerika Serikat, merupakan lawan yang rentan. Sebaliknya, Vietnam adalah negara dengan pengalaman tempur panjang, struktur militer reguler, serta dukungan logistik yang lebih konsisten.

Dengan demikian, kasus Kamboja membuktikan bahwa strategi asimetris bukanlah formula universal untuk kemenangan, melainkan bersifat kontekstual. Efektivitasnya hanya berlaku pada kondisi tertentu, khususnya ketika rezim lawan kehilangan legitimasi domestik atau gagal menjaga kohesi militer.

7.2 Legitimasi Politik dan Dukungan Sosial

Salah satu pelajaran penting dari kejatuhan Khmer Merah adalah bahwa legitimasi sosial tidak dapat digantikan oleh kemenangan militer. Teori keamanan internal Collier (2009) menekankan bahwa sebuah rezim hanya dapat bertahan jika memiliki basis dukungan rakyat. Dalam kasus Pol Pot, kebijakan represif seperti evakuasi paksa kota, kerja paksa massal, dan eksekusi politik menghancurkan hubungan antara negara dan rakyat.

Perubahan ini sangat kontras dengan periode awal 1970-an ketika Khmer Merah justru mendapatkan simpati dari petani desa. Peralihan rakyat dari posisi “air bagi ikan” menjadi pihak yang menolak gerakan Khmer Merah membuktikan bahwa dukungan sosial merupakan faktor dinamis. Tanpa legitimasi politik, strategi militer, betapapun efektif, akan kehilangan daya tahan jangka panjang (Hinton, 2005; Kiernan, 2002).

7.3 Dimensi Ideologi dan Propaganda

Khmer Merah membuktikan bahwa perang asimetris tidak hanya bergantung pada aspek militer, tetapi juga pada kekuatan ideologi. Propaganda anti-imperialis dan narasi kembali ke agrarianisme awalnya efektif dalam merekrut dan memobilisasi massa (Davies & Rees, 2023). Namun, ketika ideologi diterjemahkan ke dalam kebijakan ekstrem yang merugikan rakyat, efektivitasnya menurun drastis.

Hal ini menunjukkan keterbatasan penggunaan ideologi sebagai instrumen kekuasaan. Ideologi dapat menjadi faktor perekat yang kuat, tetapi hanya jika selaras dengan kebutuhan dan harapan rakyat. Dalam kasus Khmer Merah, ideologi yang awalnya menyatukan akhirnya menjadi alat represi, sehingga menggerus dukungan sosial.

7.4 Peran Sistem Internasional

Faktor eksternal memainkan peran yang tidak kalah penting. Kemenangan Khmer Merah atas Lon Nol sangat dipengaruhi oleh dukungan Vietnam Utara dan Tiongkok. Namun, kejatuhan mereka juga tidak bisa dilepaskan dari pergeseran dinamika geopolitik. Vietnam, yang pada awalnya menjadi sekutu, kemudian berubah menjadi musuh utama. Invasi Vietnam pada 1978 menandai kegagalan Khmer Merah membaca ulang struktur sistem internasional (Waltz, 1979).

Dalam konteks ini, kasus Kamboja menunjukkan bahwa insurgensi tidak dapat dilepaskan dari intervensi aktor eksternal. Dukungan internasional dapat mempercepat kemenangan, tetapi perubahan aliansi global dapat pula mempercepat kejatuhan. Isolasi diplomatik Khmer Merah akibat pelanggaran HAM semakin memperparah kerentanan mereka.

7.5 Komparasi dengan Insurgensi Modern

Pengalaman Khmer Merah memiliki relevansi dengan kasus insurgensi modern. Misalnya, Taliban di Afghanistan berhasil kembali berkuasa pada 2021 setelah dua dekade perang melawan Amerika Serikat. Sama seperti Khmer Merah, Taliban memanfaatkan taktik gerilya dan dukungan sosial pedesaan. Namun, berbeda dengan Khmer Merah, Taliban lebih berhati-hati dalam menjaga dukungan rakyat pasca kemenangan (Giustozzi, 2021).

Di sisi lain, ISIS di Irak dan Suriah menunjukkan pola yang mirip dengan Khmer Merah. Keberhasilan awal mereka dalam merebut wilayah luas pada 2014 justru runtuh dalam beberapa tahun akibat hilangnya legitimasi sosial dan tekanan militer koalisi internasional (Lister, 2016). Pola ini menegaskan bahwa insurgensi yang mengabaikan legitimasi politik cenderung mengalami kejatuhan meskipun sempat memperoleh kemenangan spektakuler.

Dengan demikian, kasus Khmer Merah memperkaya perdebatan tentang dinamika insurgensi kontemporer, terutama dalam menyoroti keseimbangan antara taktik militer, legitimasi sosial, dan aliansi internasional.

7.6 Implikasi Teoretis

Dari perspektif teori, studi ini menantang pemahaman tradisional mengenai peperangan asimetris. Pertama, teori perang gerilya Mao (1961) yang menekankan pentingnya dukungan rakyat terbukti relevan. Namun, kasus Khmer Merah memperlihatkan bahwa dukungan rakyat bukanlah faktor statis, melainkan dapat berubah drastis ketika rezim mengadopsi kebijakan represif.

Kedua, teori asimetris Metz dan Johnson (2001) perlu direvisi untuk menambahkan variabel legitimasi politik. Strategi asimetris tidak hanya soal

kelemahan struktural lawan, tetapi juga soal kemampuan aktor insurgensi mempertahankan dukungan rakyat dan aliansi internasional.

Ketiga, teori sistem Waltz (1979) menunjukkan pentingnya faktor eksternal, tetapi kasus ini memperlihatkan bahwa aktor kecil seringkali gagal membaca perubahan aliansi global, sehingga rentan terhadap isolasi.

7.7 Relevansi Praktis

Bagi kalangan militer dan pembuat kebijakan, kasus Khmer Merah memberikan sejumlah pelajaran praktis:

1. **Kemenangan militer tidak cukup** → stabilitas jangka panjang memerlukan legitimasi politik dan kepercayaan rakyat.
2. **Insurgensi memerlukan adaptasi berkelanjutan** → strategi yang berhasil di satu konteks dapat gagal total di konteks lain.
3. **Aliansi internasional harus dikelola secara dinamis** → dukungan eksternal bisa berubah arah, sehingga strategi pertahanan harus mempertimbangkan fleksibilitas diplomatik.
4. **Aspek kemanusiaan tidak bisa diabaikan** → rezim yang menimbulkan penderitaan massal akan kehilangan dukungan domestik dan internasional.

7.8 Sintesis Diskusi

Secara keseluruhan, kemenangan dan kejatuhan Khmer Merah menunjukkan bahwa perang asimetris memiliki batasan inheren. Strategi militer yang efektif melawan rezim lemah tidak serta merta menjamin keberhasilan dalam menghadapi lawan yang lebih kuat dan berpengalaman. Lebih jauh lagi, tanpa legitimasi sosial dan

aliansi internasional yang berkelanjutan, insurgensi akan kehilangan kemampuan bertahan.

Dengan meninjau kasus Kamboja dalam kerangka teori dan membandingkannya dengan insurgensi kontemporer, penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan multidimensional dalam menganalisis konflik asimetris. Aspek militer, politik, sosial, ideologi, dan internasional harus dipahami sebagai elemen yang saling berinteraksi dalam menentukan arah kemenangan maupun kejatuhan sebuah gerakan bersenjata.

8. Kesimpulan dan Implikasi

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi militer Pol Pot dan Khmer Merah memiliki dua wajah yang kontras: berhasil dalam merebut kekuasaan dari Lon Nol (1970–1975), tetapi gagal mempertahankan pemerintahan menghadapi Hun Sen dan Vietnam (1975–1979). Pada fase pertama, keberhasilan Khmer Merah dijelaskan oleh efektivitas taktik gerilya ala Mao (1961), propaganda ideologis yang kuat, kelemahan struktural pemerintahan Lon Nol, serta dukungan eksternal dari Vietnam Utara dan Tiongkok. Strategi asimetris ini terbukti mampu menggulingkan rezim yang tidak memiliki legitimasi politik yang memadai.

Namun, pada fase kedua, rezim Pol Pot justru kehilangan legitimasi akibat kebijakan represif yang ekstrem, seperti evakuasi kota, kerja paksa, dan eksekusi massal. Faktor ini, ditambah dengan keunggulan militer reguler Vietnam dan isolasi diplomatik internasional, mempercepat kejatuhan Khmer Merah pada 1979 (Etcheson, 2005; Kiernan, 2002; Smith, 2023). Dengan demikian, teori keamanan internal Collier (2009) dan sistem internasional Waltz (1979) menegaskan bahwa **legitimasi domestik dan aliansi internasional** merupakan elemen vital dalam menjaga keberlangsungan sebuah rezim hasil insurgensi.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang **batas-batas strategi asimetris**. Strategi gerilya dan propaganda efektif pada tahap perebutan

kekuasaan, tetapi tidak cukup untuk mempertahankan kekuasaan negara dalam jangka panjang tanpa basis sosial yang kuat dan dukungan internasional yang konsisten (Metz & Johnson, 2001). Hal ini memperkaya literatur tentang insurgensi dengan menekankan dinamika legitimasi dan faktor eksternal.

Secara praktis, studi ini memberikan pelajaran penting bagi dunia militer dan kebijakan kontemporer. Pertama, kemenangan militer harus diikuti oleh strategi politik yang inklusif. Kedua, insurgensi yang mengabaikan kebutuhan rakyat akan menghadapi keruntuhan internal. Ketiga, pengelolaan aliansi internasional merupakan faktor strategis yang tidak boleh diabaikan.

Akhirnya, kemenangan dan kejatuhan Khmer Merah menjadi cermin bahwa **stabilitas politik tidak dapat dicapai hanya dengan kekuatan senjata**, melainkan membutuhkan keseimbangan antara strategi militer, legitimasi politik, dan dukungan internasional. Pelajaran ini relevan tidak hanya bagi sejarah militer Kamboja, tetapi juga bagi analisis konflik asimetris di abad ke-21.

Daftar Referensi

- Becker, E. (1986). *When the war was over: Cambodia's revolution and the voices of history*. Simon & Schuster.
- Brown, A. (2023). Revolutionary warfare and state building: The Khmer Rouge experience. *Journal of Southeast Asian Military History*, 15(1), 33–50. <https://doi.org/10.1080/jseam.2023.015>
- Chan, K., & Rith, D. (2022). Revolutionary agrarian policies and their impact on social structures in Cambodia: A Khmer Rouge perspective. *Journal of Southeast Asian Studies*, 53(2), 145–167. <https://doi.org/10.1017/S0022463422001456>
- Chandler, D. (1999). *Voices from S-21: Terror and history in Pol Pot's secret prison*. University of California Press.

- Chandler, D. (2008). *A history of Cambodia* (4th ed.). Westview Press.
- Clymer, K. J. (2004). *The United States and Cambodia, 1969–2000: A troubled relationship*. Routledge.
- Collier, P. (2009). *Wars, guns, and votes: Democracy in dangerous places*. Harper.
- Davies, J., & Rees, P. (2023). Psychological and ideological mobilization in guerrilla warfare: The case of Khmer Rouge. *Journal of Southeast Asian Conflict Studies*, 7(1), 33–51. <https://doi.org/10.1080/jseac.2023.007>
- Deac, W. (2000). *Road to the killing fields: The Cambodian war of 1970–1975*. Texas A&M University Press.
- Etcheson, C. (2005). *After the killing fields: Lessons from the Cambodian genocide*. Praeger.
- Gottesman, E. (2003). *Cambodia after the Khmer Rouge: Inside the politics of nation building*. Yale University Press.
- Haas, M. (1991). *Genocide by proxy: Cambodian pawn on a superpower chessboard*. Praeger.
- Hinton, A. L. (2005). *Why did they kill? Cambodia in the shadow of genocide*. University of California Press.
- Johnson, M. (2024). The impact of guerrilla warfare on Cambodian political structures: An analysis of Pol Pot's tactics. *Asian Journal of Military History*, 12(1), 112–130. <https://doi.org/10.1080/ajmh.2024.112>
- Kiernan, B. (2002). *The Pol Pot regime: Race, power, and genocide in Cambodia under the Khmer Rouge, 1975–79* (3rd ed.). Yale University Press.
- Lee, E. (2024). Pol Pot and Hun Sen: A comparative analysis of military strategies in post-Lon Nol Cambodia. *Journal of Southeast Asian Political Studies*, 18(2), 159–176. <https://doi.org/10.1080/jseaps.2024.018>
- Lister, C. (2016). *The Syrian jihad: Al-Qaeda, the Islamic State and the evolution of an insurgency*. Oxford University Press.



- Mao, Z. (1961). *On guerrilla warfare*. Foreign Languages Press.
- Metz, S., & Johnson, D. (2001). *Asymmetry and U.S. military strategy: Definition, background, and strategic concepts*. U.S. Army War College.
- Nguyen, T. (2023). The enforced transformation of Cambodian society under Khmer Rouge: An analysis of social and political tactics. *Asian Journal of Conflict Studies*, 15(3), 201–219. <https://doi.org/10.1080/ajcs.2023.015>
- Osborne, M. (2008). *Phnom Penh: A cultural history*. Oxford University Press.
- Scott, J. C. (1998). *Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed*. Yale University Press.
- Shawcross, W. (1987). *Sideshow: Kissinger, Nixon, and the destruction of Cambodia*. Simon & Schuster.
- Short, P. (2005). *Pol Pot: Anatomy of a nightmare*. Henry Holt.
- Smith, R. R. (2023). Strategic adaptation of Khmer Rouge: A study of Pol Pot's military tactics during the Cambodian civil war. *Journal of Conflict Studies*, 45(2), 45–63. <https://doi.org/10.1080/jcs.2023.045>
- Thompson, L., & Lee, R. (2022). Asymmetric warfare and external support: Lessons from Southeast Asia. *Journal of Military Strategy*, 11(4), 77–99. <https://doi.org/10.1080/jms.2022.011>
- Vickery, M. (1999). *Cambodia, 1975–1982*. Silkworm Books.
- Waltz, K. (1979). *Theory of international politics*. Addison-Wesley.